

SUMBER DAYA MANUSIA BERMARTABAT: DARI TEKNOKRATIK KE KARAKTER

I Wayan Gede Suacana¹

Universitas Warmadewa, Email: suacana@gmail.com

ABSTRACT

Orthodoxy is the present state that we must prepare to face the challenges of the age symbolized by the new mysticism, the number "2020". Economic challenges most noticeable each country according to proponents of technocratic is to increase the added value potential (which can be donated by citizens respectively) to the global economy, by improving skills and their abilities and improving infrastructure facilities that can link the skills and expertise it with (the needs of) the world market. The main component in this effort is to increase the ability to produce goods and services that are solid knowledge and information. In other words, the mastery of science and information technology (IT) is a necessity. Proponents of humanist-spiritualist want to equip it with the formation of good character in the process of human resource development. This strategy wants more "humanizing" human development by making themselves as the center (not industrial), with its main source of creativity and personal commitment (not capital).

Key words: human resources, development, character

1. PENDAHULUAN

Peningkatan perkembangan manusia seutuhnya (lahir batin), persamaan dan *sustainability* manusia juga dijadikan fokus utama dalam proses pengembangan SDM. Bersamaan dengan itu terjadi pula perubahan pandangan tentang peran dari sumber daya manusia. Pandangan yang pernah menganggap sumber daya manusia hanya sebagai objek pembangunan berubah ke pandangan yang memuliakan sumber daya manusia sebagai subjek pembangunan²

Pembangunan tanpa pengembangan kemampuan SDM tidak dapat dianggap sebagai pembangunan³. Sebab itu keberhasilan suatu pembangunan pada dirinya pertama-tama perlu diukur pada keberhasilan meningkatkan kemampuan manusia.

¹ Dosen pada Program Studi MAP Program Pascasarjana Universitas Warmadewa

² Lihat Arif Budiman, *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1995; Amir Effendi Siregar (ed) *Arus Pemikiran Ekonomi Politik: Esai-esai Terpilih*, Tiara Wacana, Yogyakarta, 1991 atau M. Francis Abraham, *Modernisasi di Dunia Ketiga: Suatu Teori Umum Pembangunan*, Tiara wacana, Yogyakarta, 1991. Sedangkan untuk kasus Indonesia, bisa dibaca Suwarsono dan Alvin Y. So, *Perubahan Sosial dan Pembangunan di Indonesia*, LP3ES, Jakarta, 1991.

³ Said Zainal Abidin, "Pembangunan Sumber Daya Manusia dan Tantangannya dalam PJP II", dalam *Manajemen Pembangunan*, No. 10/ III, 1995.

Pembangunan prasarana sarana pembangunan berguna kalau itu dapat menunjang pengembangan kemampuan manusia. Pentingnya arti pembangunan SDM itu dapat dilihat pada pembangunan beberapa negara, yang mengalami kekalahan dan kehancuran selama Perang Dunia II. Mereka secara cepat dapat menyembuhkan diri dan mencapai tingkat kemajuan yang tinggi karena selama peperangan itu kualitas SDM yang sudah tinggi yang termanifestasi dalam:⁴ komunitas ilmiah, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta budaya intelektual tidak ikut runtuh. Padahal sumber alam kedua negara tersebut relatif sangat kurang.

Pengembangan SDM pada dasarnya merupakan proses pengembangan kualitas manusia dan mentransformasikannya menjadi angkatan kerja produktif. Sementara, kualitas SDM yang diinginkan adalah kemampuan melaksanakan pembangunan secara inovatif dan kreatif, secara produktif dan dengan semangat kerja dan disiplin yang tinggi. Kategori kerja dan tipe produksi dapat digambarkan sebagai berikut⁵:

Kategori kerja/ fungsi	Kemampuan yang dituntut	Tipe produksi
<i>Routine production services</i>	Pendidikan: SMP/ SMA Kualitas: bisa diandalkan, setia dan mampu menjalankan perintah	<i>High-volume production</i>
<i>In-person services</i>	Pendidikan: SMA Kualitas: teliti, bisa diandalkan, patuh dan berkepribadian/ berpenampilan menarik	
<i>Symbolic-analytic services:</i> 1. <i>Problem-solving</i> 2. <i>Problem-identifying</i> 3. <i>Strategic-brokering</i>	Pendidikan: perguruan tinggi Kualitas: kreativitas dalam “ <i>solving, identifying dan brokering problems</i> ” dengan memanipulasi simbol-simbol	<i>High-value production</i>

Pemerintah hingga saat ini telah cukup merespon masalah pengembangan SDM yang dimanifestasikan dalam berbagai program. Pada tingkat makro, pemerintah Orde Baru sebelumnya pernah mencanangkan program “link and match”⁶, sedangkan pasca

⁴ Heru Nugroho, *op.cit.*, hlm. 116.

⁵ Mohtar Mas’oed, “Politik, Alih Teknologi dan Mutu Pekerja: Pokok-pokok Pikiran Spekulatif”, paper dipresentasikan pada *Seminar Sumber Daya Manusia Menjelang 2020*, diselenggarakan oleh Himpunan Indonesia untuk Pembangunan Ilmu-ilmu Sosial (HIPIIS) Cabang Yogyakarta, 24 Oktober 1995.

⁶ Program *link and match* yang dicanangkan oleh mantan Mendikbud Wardiman Djojoningrat pada masa pemerintahan Orde Baru cukup banyak menimbulkan kontroversi wacana terutama kemunculan istilah sarjana “siap pakai” dan “siap dikembangkan” bagi indikator kualitas SDM lulusan universitas dan politeknik. Sebaliknya, pendidikan neo humanis dari pendekatan Timur menekankan tujuan akhir

reformasi mulai diterapkan kurikulum berbasis kompetensi untuk pendidikan formal, serta pendidikan ketrampilan di berbagai bidang bagi masyarakat. Pada tingkat mikro, berbagai tipe *training* atau pendidikan dan pelatihan (DIKLAT) telah dilakukan, seperti peningkatan loyalitas pegawai, *training* lapangan yang bersifat teknis fungsional, administrasi dan manajemen, kepemimpinan, penguasaan ilmu dan teknologi, dan bidang-bidang khusus lainnya. Walau belum maksimal, tampaknya pemerintah sudah cukup memberikan perhatian pada jenis dan kualitas DIKLAT dalam menanggapi tuntutan kehidupan kenegaraan yang semakin kompleks di tengah situasi krisis, baik tuntutan atau permintaan pasar dalam negeri maupun luar negeri (global).

Demokrasi pendidikan sebagai salah satu elemen vital peningkatan kualitas SDM menjadi penting untuk diperhatikan. Ide demokrasi yang memberikan hak setiap masyarakat untuk memperoleh pendidikan telah mendorong banyak orang menjangkau pendidikan setinggi mungkin⁷. Mengadakan seleksi dengan *merit system* yang berlandaskan objektivitas menjadi nampak konservatif di tengah derasnya hembusan angin kapitalisme pendidikan lewat program ekstensi yang diadakan oleh sebagian besar PTN dan PTS di negeri tercinta ini⁸. Ironisnya kapitalisme pendidikan tersebut tidak disertai kebijakan untuk menjadikan pendidikan sebagai prioritas utama pilar pembangunan nasional, sehingga kualitas SDM kita masih tetap memprihatinkan yaitu hanya menempati urutan 112 dari 173 negara⁹.

Tulisan singkat ini berupaya membahas salah satu artikel Heru Nugroho, “Pendidikan, Etika Demokrasi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia” yang termuat dalam bukunya, *Menumbuhkan Ide-ide Kritis*. Sistematika pembahasan berturut-turut

pendidikan adalah pembentukan karakter, bukan yang lainnya. Lihat I Wayan Sadia (penerjemah), *Pendidikan Nilai-nilai Kemanusiaan untuk Jaman Baru*, Sri Sathya Sai Centre, Jakarta, tt. Atau Avadhutika Anandamitra Acarya, *Pendidikan Neo-Humanis: Pendidikan untuk Menyongsong Zaman Keemasan Umat Manusia*, Persatuan Ananda Marga Indonesia, Jakarta, 1991.

⁷ Konsep “membebaskan” masyarakat dari ketergantungan (hanya) pada pendidikan formal diuraikan dengan sangat baik oleh Ivan Illich, dalam *Deschooling Society*, atau Faule Freire, *Education for Critical Consciousness*, New York, 1973.

⁸ Kontroversi keberadaan program ekstensi sudah sering diekspose media massa. Beberapa yang dipersoalkan menyangkut sistem seleksi, diskriminasi perlakuan terhadap mahasiswa reguler, persyaratan sudah bekerja bagi mahasiswa, dan “kecemburuan” PTS karena kompetisi yang tidak fair. Contoh keluhan akibat perlakuan diskriminatif dari seorang mahasiswa ekstensi, dapat dilihat dalam Surat Pembaca *Bali Post*, Jumat Wage, 24 September 2004 dan tanggapan dari pengelola program ekstensi dimuat dalam Surat Pembaca *Bali Post*, Senin Paing, 27 September 2004.

⁹ Wapres Hamzah Haz, “Tak Jelas, (Arah) Pembangunan Pendidikan” dalam *Bali Post*, Senin Paing, 27 September 2004.

adalah: 1) beberapa tantangan peningkatan kualitas SDM; 2) etika demokrasi dan karakter; dan 3) penutup pembahasan.

Tinjauan yang dikemukakan hanya merupakan percikan awal gagasan kami berdua yang masih bersifat spekulatif. Spekulasi pemikiran ini tentu akan menjadi lebih bermakna apabila ada negasi, antitesis pemikiran yang mendorong ke arah sintesis pemikiran baru yang lebih aktual, tajam dan terpercaya dalam mengatasi problema pengembangan SDM ke depan.

2. TANTANGAN KUALITAS SDM

Sosiolog Heru Nugroho, yang dosen Fisipol UGM giat dan sangat tertarik melakukan penelitian sosial dari dimensi kritis¹⁰. Sebagai seorang akademisi yang meraih gelar doktor di Universitas Bielefeld Jerman, yang merupakan asal sebagian aliran-aliran kritis dalam ilmu sosial, maka tidak mengherankan apabila Heru lalu terinspirasi dan berhasrat berpikir kritis dengan karya-karya tulisnya yang cenderung bersifat emansipatoris. Ia dengan beberapa koleganya telah mendirikan sebuah pusat kajian yang diberi nama: *Center for Critical Sosial Studies (CCSS)* di Yogyakarta. Meskipun sangat obsesif dengan pemikiran kritis ia tetap memiliki rasa humor dan bersikap santai. Bahkan untuk menyalurkan hobinya dalam seni musik ia kerap menjadi “komentator” dalam acara senandung musik jazz yang disiarkan oleh Radio Geronimo.

Bahasan Heru diawali dengan keyakinannya bahwa SDM yang berkualitas dari suatu negara merupakan andalan utama untuk pembangunan negara yang bersangkutan. Beberapa negara, seperti Jepang dan Jerman menurutnya pernah mengalami kehancuran infrastruktur, tetapi bisa bangkit kembali karena tetap eksisnya komunitas ilmiah, kualitas SDM memadai dan adanya budaya intelektual. Keberhasilan ini kemudian memberikan inspirasi bagi negara-negara “macan Asia” Korea Selatan, Taiwan, Hongkong, dan Singapura untuk mengikuti jejak kedua negara tersebut. Negara Indonesia dan beberapa negara Asia lainnya masih jauh tertinggal dalam kualitas SDM-nya.

Peningkatan kualitas SDM yang dalam PJP I hanya merupakan beban investasi, dalam PJP II diharapkan membuahkan hasil, yaitu sikap kemandirian masyarakat dalam

¹⁰ Dimensi sosial kritis adalah salah satu paradigma dalam penelitian sosial budaya yang berlandaskan kritisisme, refleksi dan bertujuan melakukan dekonstruksi ideologi serta transformasi sosial budaya.

berbagai sektor kehidupan baik sosial, ekonomi, budaya maupun politik. Namun, ironisnya upaya menciptakan kemandirian sering mengalami distorsi kebijakan sehingga terjadi reduksi operasionalisasi ke dalam masalah-masalah teknis dan ekonomis semata-mata, tanpa melihat “kesadaran demokrasi” dan “kesadaran politik”nya. Manusia semata-mata menjadi menjadi *homo faber* atau makhluk pekerja dan tidak sebagai *homo politicus* yang memiliki kesadaran politik (hak dan kewajiban) sebagai warganegara.¹¹

Oleh karena itu untuk memperoleh hasil SDM yang optimum—yang tidak hanya meningkatkan nilai tambah dan daya kompetitif dari sebuah hasil produksi tetapi juga kesadaran berkompetisi dan berdemokrasi, maka perhatian terhadap kebijakan pendidikan perlu ditinjau kembali. Demokratisasi pendidikan tinggi bisa jadi sebuah syarat normatif yang juga harus dipenuhi untuk menciptakan kebebasan akademik yang bertanggung jawab. Kebebasan akademik ini akan merangsang munculnya gerakan intelektual di mana gerakan ini dapat digunakan sebagai SDM dalam rangka mempercepat dan sekaligus mengontrol pembangunan. Setelah persyaratan ini dipenuhi maka diperlukan peningkatan jumlah mahasiswa agar kebutuhan SDM yang memadai bagi pembangunan dapat terpenuhi¹².

Tetapi kalau melihat realitas, perguruan-perguruan tinggi hampir tidak otonom terutama bila berhadapan dengan negara (kebijakan pemerintah), pasar (komersialisasi pendidikan) dan kelompok strategis (atas nama kepentingan politik, bisnis, etnis dan agama) yang eksis dalam institusi pendidikan tinggi tersebut. Ketiga faktor tersebut sangat mendominasi keberadaan perguruan tinggi kita hingga porsi yang melebihi kewajaran sehingga berbagai kebijakan pendidikan tinggi sangat tidak otonom.

Untuk menyegarkan ingatan mohon baca kembali materi kuliah *Teori Penelitian Kebudayaan* oleh Prof. I Gde Widja pada Kamis, 23 September 2004.

¹¹ Kata “politik” dalam khasanah budaya Indonesia sudah jauh mengalami distorsi. Hal ini tidak terlepas dari strategi pembangunan nasional yang diterapkan pemerintah. Ketika masa Orde Lama, politik dijadikan panglima. Sebaliknya, selama Orde Baru ekonomi dianggap sebagai panglima, dengan slogan “pembangunan yes, politik no”. Hal ini diikuti dengan kebijakan “floating mass” yang menjauhkan masyarakat dari kehidupan politik. Politik dimaknai (hanya) sebatas pemikiran Nicolo Machiavelli, dalam bukunya “Sang Penguasa” yakni “tujuan menghalalkan segala cara” dalam merebut dan mempertahankan kekuasaan. Padahal politik sendiri adalah aneka kegiatan yang menyangkut proses menentukan kebijakan dan melaksanakan tujuan sistem politik yang telah disepakati oleh warga negara. Ia memang bisa merupakan pisau bermata dua: memberi berkah sekaligus mencelakakan. Politik kotor pasti mencelakakan, sedangkan politik beretika dan bermoral akan membawa keberkahan. Baca Frans Magnis Soeseno SJ, *Etika Politik*, PT Gramedia Utama, Jakarta, 1986.

¹² *Harian Kedaulatan Rakyat*, Sabtu Kliwon 25 September 2004 lalu mewartakan masih adanya 3 karakteristik kemandirian mahasiswa dalam berusaha yang sulit dipenuhi. Yaitu, lahir dari buah pikiran yang cerdas (*begin with the end in mind*), menggunakan daya pengungkit (*leverages*), dan berpedoman pada rencana yang efektif (*effective plan*).

3. ETIKA DEMOKRASI DAN KARAKTER

Untuk mengatasi situasi dominatif tersebut maka diperlukan pemberdayaan secara sadar yang harus dilakukan oleh civitas akademika. Pemberdayaan itu dapat dimulai dan diwujudkan dengan kehidupan demokratis di perguruan tinggi. Tanpa ada yang memulai maka tidak akan ada permulaan dari demokratisasi.

Peningkatan kualitas SDM menghendaki, paling tidak sosialisasi: 1) ilmu pengetahuan untuk keahlian; 2) teknologi untuk keahlian produktif dan yang tak kalah pentingnya 3) etika politik/ demokrasi¹³ untuk kemandirian mahasiswa. Bahkan etika sudah dianggap sebagai nilai fundamental dalam negara yang menganut sistem politik demokratis. Dengan kata lain, peningkatan SDM tidak hanya diorientasikan pada tujuan perolehan kemampuan kognitif dan psikomotoris seperti yang biasa dilakukan selama ini, tetapi juga memperhatikan rasa, hati nurani dan kepribadian, seperti tampak dalam tabel 1¹⁴:

Sifat/ Kemampuan SDM	Kategori Sifat/ Kemampuan		
	Kognitif	Psikomotoris	Rasa, Hati dan Kepribadian
Etos profesionalisme	X		X
Kemampuan komunikasi	X	X	X
Wawasan dan visi	X		
Orientasi internasional/ multikultural	X		
Wawasan teknologi & manajemen teknologi	X	X	
Kewirausahaan			X
Spesialis yang generalis	X	X	
Integritas pribadi			X
Kepekaan sosial	X		X
Mengakar pada bumi sosio- kultural	X		X

Sayangnya, perguruan tinggi kebanyakan masih alergi menyosialisasikan etika berdemokrasi yang akan meningkatkan kemandirian manusia. Perguruan tinggi masih berfokus hanya pada sosialisasi ilmu pengetahuan yang akan meningkatkan keahlian dan

¹³ Etika politik/ demokrasi sering dikorbankan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini mengakibatkan semacam infatisme politik. Lihat Wayan Gede Suacana, "Kapabilitas Regulatif dan Etika Politik" dalam *Bali Post*, Jumat Wage 14 November 2003.

¹⁴ Bambang Sudibyo, "Kualitas Manajer Profesional Menjelang Era Pasar Bebas", paper dipresentasikan pada *Seminar Sumber Daya Manusia Menjelang 2020*, diselenggarakan oleh Himpunan Indonesia untuk Pembangunan Ilmu-ilmu Sosial (HIPIIS) Cabang Yogyakarta, 24 Oktober 1995.

teknologi yang akan menambah ketrampilan produktif. Etika demokrasi hanya dapat dipraktekkan dalam dunia pendidikan yang demokratis. Jadi, pendidikan demokrasi dan demokrasi pendidikan merupakan dua hal yang saling mensyaratkan.

Oleh karena itu, peningkatan kualitas SDM sama artinya dengan peningkatan kesadaran politik, di samping peningkatan ketrampilan, keahlian, efisiensi, produktivitas, dan lain-lain. Dengan kualitas SDM yang memadai maka kegelisahan akan diskontinuitas antara *link and match* yang pernah didengungkan tidak perlu terjadi. Dengan kata lain, terjadinya demokratisasi pendidikan dan kebebasan akademik dengan indikasi munculnya gerakan intelektual yang mandiri merupakan sebuah prasyarat normatif terwujudnya kualitas SDM yang memadai bagi pembangunan.

Kelebihan alur pemikiran yang dibangun Heru adalah kemampuannya menegaskan tesis yang sudah mapan, bahwa pendidikan yang baik harus mampu mencetak sarjana yang “siap pakai”—yang biasa dianut dalam paradigma teknokratik, dengan sarjana berkarakter yang siap “dikembangkan” lagi—dalam paradigma humanis-spiritualis. Pemikiran ini tak jauh berbeda dengan “masyarakat bebas sekolah” dalam bahasa Ivan Illich, “pendidikan yang membebaskan, bukan membelenggu” dalam pandangan spiritualis J. Krishnamurti.

Dari aspek kajian budaya pemikiran ini bisa dimaknai dan dikritisi dengan menempatkannya dalam perspektif nilai-nilai kemanusiaan. M. Sastrapratedja, SJ mengharapkan, selaku budayawan yang tak ubahnya bagi “intelektual organik” masyarakat dengan meminjam istilah Gramsci, harus terus menumbuhkan kesadaran kritis masyarakat¹⁵. Dengan ungkapan lain, dewasa ini dibutuhkan pendidikan yang menghasilkan lulusan yang bermartabat, sarjana-sujana, intelektual-spiritualis, yang mampu melakukan transformasi sosio-kultural. Sebagai manusia bermartabat, mereka akan mampu melakukan hubungan antarsesama atau antar kelompok dalam komunitas, dan menentukan seberapa jauh masyarakat dapat berfungsi sebagai suatu kesatuan yang kuat dan dinamis, mampu mengadakan dan menyesuaikan diri dengan perubahan¹⁶.

Perpaduan ilmu pengetahuan dan siritual bisa menjadi tali penyambung antara *mainstream* pemikiran rasionalisme Barat yang lebih mengarah pada *material tendency forces* (preyoshakti) dengan kebijaksanaan Timur yang menekankan pada *spiritual*

¹⁵ M. Sastrapratedja, SJ, “Konsep Kualitas dan Martabat Manusia: Konsep Budayawan dan Masyarakat” dalam Sofian Effendi dkk (ed), *Membangun Martabat Manusia: Penerapan ilmu-ilmu Sosial dalam Pembangunan*, Gadjah Mada University Press, 1993.

¹⁶ M. Alwi Dahlan, “Menjabarkan Kualitas dan Martabat Manusia dan Masyarakat”, dalam *loc.cit.*

tendency forces (sreyoshakti)¹⁷. Dalam pandangan Timur, pendidikan diartikan tidak semata-mata memperoleh informasi dari luar, tetapi juga mengeluarkan atau menambah hal yang berada di dalam. Manusia semestinya mampu menampilkan sifat-sifat suci yang terpendam di dalam hatinya dan mengamalkannya, sehingga manusia akan bebas dari terpaan topan kekaburan batin serta mencapai kebahagiaan jiwa¹⁸.

Pendidikan yang berbasiskan kompetensi atau *link and match* yang pernah dan atau sedang diterapkan semuanya berkaitan dengan kepala, logika, rasionalitas. Nilai-nilai spiritual dan kemanusiaan seperti welas asih, kesabaran, dan kejujuran berasal dari hati yang akan mengembangkan kesadaran belum sepenuhnya dikembangkan. Sesungguhnya, yang dipenuhi dengan daya ‘welas asih’ adalah *hridaya* ‘hati’ bukan kepala. *Hridaya* adalah merupakan sumber kebahagiaan batin.

Demokrasi pendidikan zaman sekarang—apalagi yang cenderung, meminjam istilah Heru, mengikuti Darwinisme dalam bentuknya yang paling komersial, seperti pembukaan program ekstensi pada berbagai Perguruan Tinggi hanya untuk mengejar pemenuhan kebutuhan material, dan (bukan) kualitas SDM, apalagi berusaha untuk mengembangkan kesadaran dan nilai-nilai kemanusiaan. Tiada artinya seluruh pengetahuan di perguruan tinggi bila manusia “siap pakai” yang dicetak tidak mempunyai karakter yang baik. Hal itu tak ubahnya bagai air yang mengalir ke dalam selokan, tidak bermanfaat banyak bagi kehidupan. Tidak ada gunanya bila peningkatan SDM tidak disertai pula dengan pengembangan karakter yang baik. Krisis yang melanda bangsa ini, di samping disebabkan faktor keuangan dan ekonomi, juga tidak terlepas dari merosotnya moral dan kepribadian bangsa¹⁹.

Peningkatan SDM melalui pendidikan yang dimaksudkan untuk target memperoleh pekerjaan dan uang adalah gagasan keliru. Satu-satunya tujuan pendidikan adalah untuk memperoleh sifat dan watak yang luhur (moralitas), seperti: *viveka*, *vairagya* dan *vichakshana* untuk memantapkan kedamaian, kebenaran, dan darma dengan mengembangkan cinta kasih. Uang bisa datang dan pergi tetapi moralitas akan datang dan tumbuh. Pendidikan untuk seumur hidup bukan untuk sekadar hidup.

¹⁷ Fritjof Capra, *Tao of Physics: Menyingkap Paralelisme Fisika Modern dan Mistisisme Timur*, Jalasutra, Yogyakarta, 2001 atau Wayan Maswinara, *Ilmu Pengetahuan dan Spiritual Berdasarkan Veda*, Penerbit Paramitha Surabaya, 1998.

¹⁸ John S. Hislop, *Percakapan dengan Bhagawan Sri Sathya Sai Baba*, Yayasan Sri Sathya Sai Baba Indonesia, Jakarta, 2001.

¹⁹ Wapres Hamzah Haz, “Tak Jelas, (Arah) Pembangunan Pendidikan” dalam *Bali Post*, Senin Paing, 27 September 2004.

Pendidikan itu untuk hidup bukan untuk penghidupan. Cara hidup jauh lebih penting daripada tingkat kehidupan. Pendidikan sejati membantu meningkatkan welas asih serta kasih dan akhirnya membawa manusia menuju Tuhan. Pendidikan semacam itulah yang kini dibutuhkan bukan sederatan gelar akademis semata.

Tidak diragukan lagi, bahwa demokrasi pendidikan itu penting. Akan tetapi, seiring dengan itu, SDM yang berkualitas juga harus memperoleh pendidikan budi pekerti, moral dan spiritual. Secara realitas, pendidikan modern sekarang sudah menjadi sangat artifisial. Sejak pendidikan tingkat dasar hingga perguruan tinggi, segala sesuatu dihubungkan dengan uang. Karena jumlah uang yang sangat besar harus dikeluarkan untuk masuk fakultas favorit (yang juga merupakan bentuk “hegemonik fakultas”), seperti kedokteran dan ekonomi, maka orang menempuh berbagai cara yang tidak lumrah guna memperoleh kembali uang tersebut setelah lulus. Semua ini merupakan gagasan yang keliru. Sumber daya manusia semacam ini tidak bisa disebut terpelajar apalagi cendekia dalam arti yang sesungguhnya.

Tanggung jawab perguruan tinggi akan menjadi lengkap bila SDM yang dihasilkannya bersih sepenuhnya lahir batin. Pendidikan yang diselenggarakan hendaknya menjadikan lulusannya manusia berkarakter baik. Pendidikan demikian menanamkan kerendahan hati. Hanya dengan begitu kita bisa menjadikan karakter sebagai “kekuasaan” dalam kehidupan, bukan ilmu pengetahuan. Bahkan untuk mendapatkan pengetahuan diperlukan karakter yang baik. Penerapan ilmu pengetahuan tanpa disertai karakter yang baik telah terbukti banyak menimbulkan bencana dan tragedi kemanusiaan di atas persada ibu pertiwi.

4. PENUTUP

Ortodoksi masa kini menyatakan bahwa kita harus mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan zaman yang dilambangkan oleh mistisisme baru, yaitu angka “2020”. Tantangan ekonomi paling nyata setiap negara menurut pendukung aliran teknokratik adalah meningkatkan nilai tambah potensial (yang bisa disumbangkan oleh warganegara masing-masing) ke ekonomi global, dengan cara meningkatkan kecakapan dan kemampuan mereka dan memperbaiki prasarana sarana yang bisa mengaitkan kecakapan dan keahlian itu dengan (kebutuhan) pasar dunia. Komponen utama dalam upaya itu adalah peningkatan kemampuan memproduksi barang dan jasa yang padat

pengetahuan dan informasi. Dengan kata lain, penguasaan ilmu dan teknologi informasi (TI) merupakan sebuah keniscayaan.

Pendukung aliran humanis-spiritualis ingin melengkapi semua itu dengan pembentukan karakter yang baik dalam proses pengembangan SDM. Strategi ini ingin lebih “memanusiakan” manusia dalam pembangunan dengan menjadikan diri mereka sendiri sebagai pusat (bukan industri), dengan sumber utamanya kreativitas dan komitmen diri (bukan modal). Peningkatan perkembangan manusia seutuhnya (lahir batin), persamaan dan *sustainability* manusia juga dijadikan fokus utama dalam proses pengembangan SDM.

Paralelisme pandangan aliran ini terasa makin komplis, bahkan ketika Gandhi—Sang Mahatma menyatakan: “Orang Timur telah menyerahkan diri pada penaklukan budaya oleh Barat. Padahal sebenarnya Barat yang menerima kearifan dari Timur, dari Zoroaster, Budha, Nabi Musa, Isa, Muhammad, Rama, Krishna, dan lain-lain. Pesan dari Timur harus dipahami tidak melalui kacamata Barat, atau lewat berbagai ancaman bom. Pesan yang diberikan pada Barat seharusnya pesan kasih (*prema*) dan kebenaran (*sathya*). *Aku tidak hanya hendak menghimbau pikiranmu, tetapi aku ingin merebut hatimu*”. *Udara caritanam tu vasudaiva kutumbakam*. Hanya ia yang hatinya diliputi kasih (*prema*) yang tak terbatas merangkum seluruh dunia sebagai keluarga sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Siregar, Amir Effendi (ed) *Arus Pemikiran Ekonomi Politik: Esai-esai Terpilih*, Tiara Wacana, Yogyakarta, 1991 atau M. Francis Abraham, *Modernisasi di Dunia Ketiga: Suatu Teori Umum Pembangunan*, Tiara wacana, Yogyakarta, 1991.
- Abidin, Said Zainal, “Pembangunan Sumber Daya Manusia dan Tantangannya dalam PJP II”, dalam *Manajemen Pembangunan*, No. 10/ III, 1995.
- Mas’oed, Mohtar, “Politik, Alih Teknologi dan Mutu Pekerja: Pokok-pokok Pikiran Spekulatif”, paper dipresentasikan pada *Seminar Sumber Daya Manusia Menjelang 2020*, diselenggarakan oleh Himpunan Indonesia untuk Pembangunan Ilmu-ilmu Sosial (HIPIIS) Cabang Yogyakarta, 24 Oktober 1995.
- Anandamitra, Acarya Avadhutika, *Pendidikan Neo-Humanis: Pendidikan untuk Menyongsong Zaman Keemasan Umat Manusia*, Persatuan Ananda Marga Indonesia, Jakarta, 1991.

Illich Ivan, dalam *Deschooling Society*, atau Faule Freire, *Education for Critical Consciousness*, New York, 1973.

Hamzah Haz, “Tak Jelas, (Arah) Pembangunan Pendidikan” dalam *Bali Post*, Senin Paing, 27 September 2004.

Sudibyoy, Bambang, “Kualitas Manajer Profesional Menjelang Era Pasar Bebas”, paper dipresentasikan pada *Seminar Sumber Daya Manusia Menjelang 2020*, diselenggarakan oleh Himpunan Indonesia untuk Pembangunan Ilmu-ilmu Sosial (HIPIIS) Cabang Yogyakarta, 24 Oktober 1995.

Sastrapratedja, M. SJ, “Konsep Kualitas dan Martabat Manusia: Konsep Budayawan dan Masyarakat” dalam Sofian Effendi dkk (ed), *Membangun Martabat Manusia: Penerapan ilmu-ilmu Sosial dalam Pembangunan*, Gadjah Mada University Press, 1993.

Capra, Fritjof, *Tao of Physics: Menyingkap Paralelisme Fisika Modern dan Mistisisme Timur*, Jalasutra, Yogyakarta, 2001

Maswinara, Wayan, *Ilmu Pengetahuan dan Spiritual Berdasarkan Veda*, Penerbit Paramitha Surabaya, 1998.

John S. Hislop, *Percakapan dengan Bhagawan Sri Sathya Sai Baba*, Yayasan Sri Sathya Sai Baba Indonesia, Jakarta, 2001.